

Susi: Batasi Keramba Ikan Agar Danau Kerinci Tak Tercemar



Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menebarkan benih ikan asli Danau Kerinci di Danau Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi

Danau Kerinci di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi harus diselamatkan dari pencemaran usaha keramba ikan (jaring apung). Usaha keramba ikan di danau yang memiliki luas sekitar 4.200 meter persegi (m²) tersebut harus dibatasi agar jangan sampai melebihi kapasitas.

Bila usaha keramba ikan di Danau Kerinci tidak dibatasi, kondisi danau di kawasan pegunungan itu dikhawatirkan bisa mengalami nasib yang sama dengan Danau Toba, Sumatera Utara, Danau Maninjau dan Singkarak, Sumatera Barat maupun Cirata dan Saguling, Jawa Barat.

"Kita harus belajar dari kasus-kasus pencemaran danau akibat over kapasitas keramba ikan di Danau Toba, Maninjau, Singkarak dan Saguling. Pencemaran akibat over kapasitas keramba di beberapa danau tersebut membuat ikan mati massal, sehingga banyak petani dan pengusaha merugi, " kata Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti ketika berkunjung ke Danau Kerinci, Provinsi Jambi.

"Kemudian over kapasitas usaha keramba ikan di danau tersebut juga membuat daya tarik wisata memudar. Hal tersebut jangan sampai terjadi di Danau Kerinci," kata Susi.

Pada kesempatan tersebut Susi melakukan penebaran sekitar 123.000 ekor benih ikan spesifik Danau Kerinci, yakni ikan nila, ikan jelayat dan ikan semah. Penebaran benih ikan itu dimaksudkan mengatasi semakin langkanya populasi ikan asli di danau tersebut. Turut hadir pada kesempatan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, HM Dianto dan Bupati Kerinci, Adirozal.

Menurut Susi Pudjiastuti, bencana pencemaran terjadi di beberapa danau di Indonesia belakangan ini disebabkan tidak terkontrolnya jumlah usaha keramba ikan. Hal tersebut sudah terbukti di Danau Toba, Sumatera Utara. Karena itu Bupati Kerinci perlu memerintahkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Perikanan Kabupaten Kerinci mengatur kerambah di Danau Kerinci.

"Jika sudah tidak mendukung lagi, silakan ditertibkan kapan perlu buat peraturan daerah. Kita takut nanti usaha keramba di danau ini jadi malapetaka. Masyarakat harus menerima pembatasan usaha keramba di Danau Kerinci. Jangan nanti sampai ikan di Danau Kerinci mati semua, sehingga bukan untung yang didapatkan malah menjadi rugi," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Susi meminta masyarakat dan jajaran pemerintah di Kerinci memanfaatkan Danau Kerinci dengan baik agar tersebut tidak sampai menimbulkan malapetaka akibat pencemaran usaha keramba ikan. Danau Kerinci juga harus dijaga agar tetap memiliki daya tarik bagi wisatawan. Jadi jangan hanya usaha keramba ikan saja yang dieksploitasi di Danau Kerinci agar daya tarik wisatanya tidak pudar.

"Danau Kerinci memiliki potensi besar di bidang pariwisata dan usaha budi daya perikanan, terutama perikanan tangkap. Potensi tersebut harus tetap dijaga dengan membatasi usaha budi daya perikanan keramba. Jika sumber daya alam perikanan digarap dengan baik, tentu Kerinci akan menjadi penyuplai terbesar perikanan di Provinsi Jambi dan sekitarnya. Kemudian objek wisata Danau Kerinci juga tetap dilirik," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Kerinci, Adi Rozal pada kesempatan tersebut mengatakan, sekitar 75 persen masyarakat Kerinci hidup dari sektor pertanian dan perikanan. Usaha perikanan di Danau Kerinci juga menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat Kerinci. Untuk meningkatkan penghasilan, para nelayan di Kerinci mengembangkan usaha budi daya ikan-ikan asli Kerinci, yakni ikan nila, semah, dan jelayat.

"Sebagian nelayan di Kerinci mencari ikan di kawasan perairan Danau Kerinci menggunakan jaring. Belum semua nelayan di Kerinci bisa mengembangkan usaha keramba ikan akibat kesulitan modal. Usaha keramba di Danau Kerinci akan terus dikembangkan guna meningkatkan pendapatan nelayan dan petani. Namun usaha keramba tersebut akan dibatasi dan ditata dengan baik," katanya.

Sementara itu, HM Dianto pada kesempatan tersebut mengatakan, Pemprov Jambi akan terus mendukung kegiatan *restocking* (penyetokan ulang) di kawasan reservasi, suaka perikanan serta lubuk larangan yang tersebar di Provinsi Jambi demi menjaga kelestarian ikan-ikan khas Jambi.

"Saat ini semakin banyak jenis ikan khas atau asli Jambi yang sudah punah akibat penangkapan ikan ilegal seperti pengeboman, strum dan pemutasan. Karena itu *restocking* benih ikan asli di Jambi perlu terus dilakukan," katanya.

Selain itu, lanjut HM Dianto, pihaknya juga terus mendukung pengembangan usaha budi daya perikanan air tawar dan perikanan tangkap di laut untuk menyerap tenaga

kerja. Potensi perikanan tangkap dan budidaya di Jambi cukup luas di kawasan pantai timur Jambi dan Sungai Batanghari. Jambi memiliki panjang sungai sekitar 1.740 Km. Kemudian daerah itu juga memiliki potensi tambak ikan sekitar 18.000 hektare.

"Sektor perikanan banyak menyerap tenaga kerja dan juga memberikan hasil panen yang relatif cepat bagi petani ikan dan nelayan. Petani ikan biasanya hanya membutuhkan waktu sekitar empat sampai lima bulan untuk panen ikan hasil budidaya," katanya.

HM Dianto mengatakan, usaha penambangan emas tanpa izin (PETI) juga menjadi salah satu ancaman usaha perikanan dan kelestarian ikan asli di Jambi. Karena itu pemberantasan PETI di Jambi harus dilakukan secara menyeluruh dan intens.

"Jajaran penegak hukum di Provinsi Jambi perlu berkerja sama dengan masyarakat setempat guna mengoptimalkan pengawasan terhadap aktivitas PETI. Hal ini penting karena kegiatan PETI dapat mengancam kesehatan masyarakat juga mengancam sumber daya perikanan. Kemudian penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti penangkapan dengan menggunakan listrik, bom maupun racun harus diberantas," ujarnya.